

MENJAGA HUBUNGAN BAIK ANTAR NEGARA TETANGGA

(INDONESIA – MALAYSIA)

Makalah



Disusun Oleh :

Muhamad Bagus Q

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

2006

PENDAHULUAN

Dalam lingkungan internasional saat ini tidak ada negara yang dapat mengisolasi dirinya terhadap pengaruh asing atau pengaruh dari negara lain. Tiap negara saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan negara tersebut. Untuk mencapai apa yang menjadi kepentingan dan keinginan negara satu terhadap negara lain, maka perlu dijalin kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama multilateral dilakukan dengan banyak negara atau satu negara bekerjasama dengan dua atau lebih negara baik di tingkat kawasan atau internasional. Sedangkan kerja sama bilateral dilakukan antara dua negara dengan kepentingan yang sama. Kerja sama bilateral cenderung banyak terjadi diantara dua negara yang dekat secara historis atau geografis, dengan kata lain kerja sama bilateral kebanyakan terjadi diantara kedua negara yang bertetangga.

Kerja sama bilateral juga terjadi diantara negara Indonesia dengan negara Malaysia, dua negara yang dekat secara geografis maupun historis telah lama menjalin kerja samanya di segala bidang. Namun dalam perjalanan kerja samanya tidak selalu berjalan harmonis karena terdapat persoalan-persoalan yang mengganggu kestabilan hubungan tersebut. Berbagai persoalan yang dulu hanya bersifat konflik laten pada akhirnya muncul ke permukaan karena kedua belah pihak tidak dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya konflik, sehingga muncul berbagai bentuk konflik seperti konflik perbatasan, *Trans Organized Crime (TOC)*, hingga terorisme. Indonesia-Malaysia terus berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut agar tidak mengganggu hubungan kedua negara. Jika hubungan baik kedua negara terganggu maka akan terganggu pula kerja sama mereka dan yang terkena kerugian akibat konflik-konflik yang terjadi adalah Indonesia dan Malaysia sendiri seperti hubungan diplomatis yang berjalan tidak harmonis, terhambatnya investasi kedua negara yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan ekonomi dan pada akhirnya yang terjadi adalah ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia.

Dengan keadaan tersebut, Indonesia harus mulai melakukan berbagai pemikiran dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga hubungan baiknya dengan Malaysia. Indonesia sendiri tidak mungkin ingin bersitegang dengan negara tetangganya yang selama ini telah ikut membantu pembangunan negara Indonesia. Sehingga Indonesia harus memikirkan upaya-upaya bagaimana untuk menjaga hubungan baik dengan Malaysia agar tidak mengganggu keharmonisan hubungan diantara kedua negara.

PEMBAHASAN

Hubungan baik antar negara yang bertetangga memang diperlukan untuk memperat jalinan kerja sama dan mencegah timbulnya konflik. Hal ini juga dialami oleh Indonesia dengan Malaysia dimana kedua negara tersebut memiliki sejarah panjang dalam hubungan kenegaraan, baik dalam lingkup bilateral maupun regional. Seiring dengan proses globalisasi yang semakin meluas, termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, maka terjadi perubahan pula dalam hubungan kedua negara tersebut. Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dihindari karena yang memegang peranan penting hubungan antar negara adalah kepentingan nasional masing-masing negara. Permasalahanpun muncul ketika kepentingan-kepentingan nasional negara-negara tersebut saling berbenturan yang pada akhirnya mempengaruhi pola hubungan antar negara. Termasuk hubungan antara negara Indonesia dengan Malaysia.

Indonesia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik perbatasan darat maupun laut. Dengan demikian selama ini telah terjalin kerja sama atau hubungan dengan negara Malaysia, karena secara geografis Indonesia dengan Malaysia sangat berdekatan. Namun pada akhir-akhir ini muncul berbagai permasalahan antar Indonesia-Malaysia yang mengganggu hubungan kedua negara, baik di bidang militer maupun non-militer, dan permasalahan tersebut berdampak pada pertahanan dan keamanan kedua negara karena letaknya yang berdekatan. Permasalahan yang bersifat *transboundary* dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan pertahanan Indonesia dan harus segera diantisipasi dan diatasi agar tidak merusak hubungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik.

KERJA SAMA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

Indonesia dan Malaysia telah bekerjasama sejak lama walaupun sempat terjadi ketegangan hubungan pada saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Sukarno sehingga muncul slogan “ganyang Malaysia!!”. Tetapi setelah konflik dapat mereda hubungan kerja sama kembali dilakukan untuk memulihkan hubungan baik kedua negara. Berbagai kerja sama telah dilakukan Indonesia dengan Malaysia hingga saat ini, sehingga tercipta hubungan baik diantara kedua negara. Kerja sama yang dilakukan meliputi berbagai bidang antara lain di bidang ekonomi, Malaysia telah menjalin kerja sama dengan Sulawesi Selatan dan berniat mengembangkannya di sektor bisnis terutama berniat untuk mengimpor beras dari Sulawesi Selatan karena beras tersebut kualitasnya hampir sama dengan beras Vietnam. Di bidang perkebunan kelapa sawit, Indonesia-Malaysia telah setuju untuk memperkuat

pasar, meningkatkan kapasitas perdagangan, memfasilitasi praktik perdagangan yang adil, dan berpartisipasi dalam misi investasi dan bisnis. Kedua negara saat ini menguasai 80 persen produksi sawit dunia dengan 28 juta ton per tahun.

Berkaitan dengan adanya masalah perbatasan diantara kedua negara, Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Tentara Malaysia kembali melakukan latihan gabungan yang difokuskan terhadap pengamanan perbatasan kedua negara di wilayah Kalimantan¹. Kedua negara bersepakat untuk berkoordinasi, beroperasi bersama tentang keamanan di perbatasan kedua negara. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi keamanan strategis kawasan kedua negara. Pada bidang teknologi, di tahun 2002 Indonesia-Malaysia bekerjasama membuat satelit mikro yang akan diluncurkan dengan orbit rendah dekat khatulistiwa². Satelit ini akan mendukung penginderaan jauh di wilayah Indonesia yang sering tertutup awan, sehingga peluang untuk memotret suatu daerah dalam kondisi bebas awan akan lebih besar. Untuk menanggapi isu terorisme, Indonesia-Malaysia bergabung dengan Filipina menandatangani *counter-terrorism treaty* pada tahun 2002 yang lalu mengenai pertukaran informasi dan kerja sama melawan terorisme. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kontrol pada daerah-daerah perbatasan dan adanya pertukaran daftar penumpang pada transportasi udara antara negara-negara. Beberapa contoh diatas merupakan sebagian kecil dari kerja sama-kerja sama Indonesia dengan Malaysia yang telah dilakukan selama ini. Interaksi-interaksi kerja sama kedua negara inilah yang makin mempererat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia.

Kautilya dalam konsep Raja Mandala mengatakan bahwa Interaksi antar negara baik dalam bentuk konflik atau kerja sama potensial terjadi pada negara-negara yang berdekatan secara geografis letaknya berdekatan. Seperti Indonesia dengan Malaysia, dapat dikatakan ritme hubungan Indonesia-Malaysia cenderung naik turun atau fluktuatif. Malaysia yang selama ini terkesan “bergandengan” dengan Indonesia, akhir-akhir ini menjadi memanas terkait dengan permasalahan perbatasan antar negara baik di laut maupun di darat. Masalah Selat Malaka yang hingga kini belum jelas statusnya, “hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan yang masih bagian dari wilayah Indonesia dan usaha Malaysia mengklaim blok Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya. Di perbatasan darat adanya penggeseran patok perbatasan antara Malaysia dan Kalimantan Timur, ditambah lagi permasalahan TOC, *transboundary issues*, yang makin memperkeruh dan mengganggu hubungan keduana negara.

1 “Indonesia-Malaysia amankan perbatasan”, dalam www.tempointeraktif.com

2 “Indonesia-Malaysia bekerjasama membuat satelit”, dalam www.ristek.go.id

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

A. Masalah Perbatasan

1. Selat Malaka

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia, masalah perbatasan merupakan masalah yang kerap dihadapi. Tumpang tindih pengaturan ZEE dengan beberapa negara tetangga juga berpotensi melahirkan friksi dan sengketa yang dapat mengarah pada konflik internasional³. Kaitannya dengan hubungan Indonesia-Malaysia, masalah perbatasan dapat terlihat dalam kasus Selat Malaka dimana kawasan perairan tersebut diklaim oleh beberapa negara yaitu Singapura, Malaysia, dan termasuk Indonesia. Kenapa Selat Malaka begitu penting? Karena Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara barat dengan negara-negara timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur perdagangan. Masalah Selat Malaka sempat akan diinternasionalisasikan, namun tidak jadi karena cukup negara-negara pantai yang menjaga perairan tersebut, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Penjagaan Selat Malaka dilakukan dengan *cooperative security*, dimana masing-masing angkatan laut negara-negara pantai melakukan patroli bersama di sekitar wilayah perairan selat Malaka. Hingga sekarang masih belum jelas status daru Selat Malaka merupakan bagian dari wilayah negara mana.

2. “Hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan dan masalah Ambalat

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan terdapat pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Namun kondisi geografis tersebut kurang diperhatikan oleh pemerintah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dari Indonesia. Hal ini terbukti dengan “hilangnya” Pulau Sipadan-Ligitan, kejadian ini membuat hubungan Indonesia-Malaysia makin memanas. Sebenarnya skenario “pengambilalihan” Pulau Sipadan-Ligitan telah dipersiapkan sejak lama oleh Malaysia tinggal menunggu waktu yang tepat dan tiba-tiba pada tahun 2000 Malaysia membawa masalah Sipadan-Ligitan ke *International Court of Justice* (ICJ) yang pada akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Kejadian membuat hubungan Indonesia-Malaysia merenggang dan slogan “ganyang Malaysia!!” kembali terdengar di Indonesia.

Hubungan RI-Malaysiaupun makin tegang dan menyeret konflik yang lebih luas. Setelah mendapatkan Sipadan-Ligitan, Malaysia berambisi menduduki Ambalat yang diduga mengandung minyak dan gas bumi yang nilainya amat besar mencapai miliaran dollar Amerika⁴. Krisis hubungan ini dimulai sejak PETRONAS (perusahaan minyak milik Malaysia) memberikan konsesi pengeboran minyak lepas pantai Sulawesi yaitu di blok Ambalat kepada SHELL (perusahaan milik Inggris dan

³ Wawan Fahrudin, “Sekuritasi maritim dan wilayah perbatasan”, dalam jurnal institute for global justice

⁴ Eggi Sudjana, dalam “TKI, illegal logging, dan kasus Ambalat”

Belanda) yang mengakibatkan hubungan Indonesia-Malaysia mengalami ketegangan yang mencemaskan. Dengan munculnya isu Ambalat tersebut, barulah Indonesia meresponnya dengan mengirim armada-armada angkatan lautnya untuk mengamankan blok Ambalat dan bahkan beberapa kali kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berhadapan dan nyaris baku tembak⁵. Namun kedua pihak dapat menahan diri, jika salah satu pihak mulai menembak maka dapat terjadi perang terbuka antara Indonesia-Malaysia.

Semua kelalaian pemerintah tersebut berakibat fatal terhadap utuhnya wilayah NKRI. Pertahanan dan keamanan kita terlalu berfokus pada aspek darat dan mengabaikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pemerintah juga terlalu lama berkutat dalam masalah ekonomi, politik, korupsi, lalu kurang memperhatikan kondisi pulau-pulau terluar wilayah Indonesia yang menjadi pintu masuk bagi berbagai ancaman dari luar sehingga pada saat muncul konflik pada saat itu pula pemerintah baru sadar dan bertindak untuk mengamatkannya.

B. Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal

Masalah tenaga kerja asal Indonesia, khususnya TKI ilegal, telah sejak lama menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah pemasok tenaga kerja (baik legal, maupun ilegal) paling banyak ke Malaysia yang rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik atau pembantu rumah tangga. Banyaknya kejadian penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak dibayarkannya gaji oleh majikan merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh para TKI ilegal di Malaysia dan jika masalah ini diperkarakan secara hukum maka para TKI akan terbentur status mereka yang ilegal. Memang benar Malaysia akan menghukum semua tenaga kerja ilegal dari negara manapun. Tetapi tenaga kerja pendatang paling banyak di Malaysia berasal dari Indonesia (TKI) dan yang menjadi persoalan mengapa pemerintah Malaysia hanya menghukum para TKI ilegal, bukan menghukum para majikan yang senang memakai TKI ilegal dan memperlakukan mereka secara semena-mena. Pemerintah Malaysia terkesan hanya keras terhadap TKI ilegal tanpa mau bersikap keras terhadap warganya yang sengaja menjadi penadah TKI ilegal.

Persoalan TKI ilegal termasuk dalam *Trans Organized Crime* (TOC) yang bersifat lintas batas negara sehingga diperlukan pengawasan di daerah perbatasan, baik di laut maupun darat terhadap lalu lintas penyaluran penyaluran TKI ilegal. Hal ini untuk menghindari makin banyaknya TKI ilegal di negara-negara tetangga. Diplomasi Indonesia dalam melakukan lobi-lobi untuk membela hak-hak TKI ilegal termasuk kurang “greget”, Indonesia kurang berani “menekan” untuk membela warganya sehingga masih terdapat TKI-TKI ilegal yang mengalami pelanggaran HAM. Hingga saat ini, 330.000

⁵ *Ibid.*

TKI yang sudah tiba di tanah air dengan memanfaatkan amnesti, sementara sekitar 400.000 TKI akan dideportasi karena tidak memiliki dokumen⁶.

C. Masalah Ilegal Logging

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar khususnya adalah hutan yang dapat memberikan hasil-hasil hutan yang sangat menjanjikan seperti kayu, rotan, dan lain-lain. Persoalan ilegal logging yang telah lama terjadi di Indonesia mencuat kembali karena makin banyaknya kayu-kayu Indonesia yang dicuri dan dibawa keluar negeri. Malaysia yang berbatasan langsung dengan Kalimantan juga dianggap sebagai “pencuri” hasil hutan Indonesia. Mafia-mafia kayu tersebut membawa kayu-kayu dari Indonesia dengan cara membeli kayu dan membiayai pencuri kayu dari Kalimantan dan Papua, yang kemudian makin maraklah ilegal logging yang didukung dana dari pengusaha kayu Malaysia⁷. Dengan makin banyaknya kayu-kayu yang dicuri, Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar karena kekayaan alamnya telah dicuri oleh negara lain. Selain itu ilegal logging juga mengakibatkan kerusakan lingkungan karena makin banyaknya penebangan liar dilakukan di hutan-hutan Indonesia. Tidak heran semakin banyak terjadinya penggundulan hutan di wilayah Indonesia.

Lolosnya kayu-kayu curian tersebut tidak terlepas dari lemahnya pada aparat yang menjaga wilayah perbatasan negara, padahal pada siaran pers disebutkan bahwa sepanjang pantai utara Jawa telah diselundupkan sebanyak 500.000 meter kubik kayu balak perbulan (setara dengan 500-700 kapal). Secara global kayu balak yang diselundupkan adalah 10 juta meter kubik. Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mafia ilegal logging yang berada di Malaysia. Pemerintah Indonesia telah menuntut penahanan mafia pencuri kayu tersebut, tetapi Kuala Lumpur tak mau menghukum warganya seperti selalu melindungi mafia kayu curian tersebut dan menjual kayu-kayu curian asal Indonesia yang diberi label legal oleh Kuala Lumpur. Kemudian kayu-kayu curian tersebut dijual ke Eropa atau Jepang.

D. Masalah Asap Kebakaran Hutan

Dampak dari kerusakan hutan Indonesia tak hanya dirasakan oleh Indonesia sendiri tapi juga oleh negara lain termasuk Malaysia. Salah satunya adalah kebakaran hutan yang terjadi akibat penggundulan hutan dan ditambah dengan fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang hebat seperti di hutan Kalimantan (kasus tahun 1994-1997)

⁶ Luki Aulia, dalam “Status ilegal yang mengganjal”

⁷ Sudjana, *Op. Cit.*

dimana asap dari kebakaran hutan tersebut sampai terbawa ke negara tetangga karena tertiuap angin. Karena luasnya wilayah kebakaran hutan maka terbentuklah kabut asap yang hampir menutupi beberapa daerah termasuk Malaysia. Selama kebakaran hutan di Indonesia terjadi, indeks standar pencemaran udara di Malaysia mencapai titik yang membahayakan. Awan tebal yang menyelimuti disamping udara yang tidak sehat di wilayah tersebut menimbulkan kemarahan dari masyarakat dan pemerintah Malaysia. Kabut asap mengganggu kegiatan sehari-hari penduduk Malaysia seperti jarak pandang yang terbatas dan mereka harus menggunakan masker jika mereka melakukan kegiatan diluar rumah atau melakukan perjalanan.

Nilai keseluruhan kerugian akibat asap yang diderita Malaysia⁸

| Jenis Kerugian** | Juta RM | Juta US\$ | Presentasi |
|--|---------|-----------|------------|
| Biaya sakit yang telah disesuaikan | 21,02 | 8,41 | 2,62 |
| Kerugian produktivitas selama keadaan darurat di negara bagian | 393,51 | 157,40 | 49,07 |
| Penurunan jumlah kedatangan wisatawan | 318,55 | 127,42 | 39,72 |
| Pembatalan penerbangan | 0,45 | 0,18 | 0,06 |
| Penurunan jumlah tangkapan ikan | 40,58 | 16,23 | 5,00 |
| Biaya pemadaman kebakaran | 25,00 | 10,00 | 3,12 |
| Penyemaian awan | 2,08 | 0,83 | 0,26 |
| Pengeluaran masker | 0,71 | 0,28 | 0,09 |
| Biaya total kerusakan | 801,90 | 321,00 | 100,00 |

Data dari EEPSEA dari bulan Oktober 1997-Mei 1998

**Biaya bagi perusahaan multinasional Malaysi sebesar RM 2,5 juta (US\$ 1 juta) tidak dimasukkan karena biaya ini mungkin telah dipergunakan oleh pemerintah untuk menghindari dampak.

Sekitar 93,2 % rakyat Malaysia tidak puas dengan sikap pemerintahnya terhadap Indonesia dan banyak yang protes turn ke jalan⁹. Rakyat Malaysi menuntut agat pemerintah Malaysia lebih mengupayakan kritik tegas pada Jakarta atas dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Selain

8 David Glover, Timothy Jessup, *Mahalnya harga sebuah bencana*, ITB Bandung, 2002, hal. 57.

9 Jejak pendapat yang diselenggarakan oleh koran Malaysia *Star*, yang hasilnya dikutip *Asiaweek*, 13 Oktober 1997

itu sekitar 60 anggota Partai Aksi Demokratik (DAP) Malaysia melakukan unjuk rasa di depan kantor kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur pada hari jumat (12/8/05). Mereka memprotes ketidakmampuan Indonesia dalam memadamkan kebakaran hutan yang menyebabkan negara mereka dilanda kabut asap, juga mengakibatkan hubungan kedua negara tetangga menjadi terganggu.

Hubungan bertetangga memang gampang-gampang susah, suatu hal kecil dapat menjadi masalah besar jika tidak disikapi dengan baik. Hal tersebut juga berlaku dalam hubungan antar negara yang bertetangga seperti Indonesia dengan Malaysia. Kita memang tidak dapat menciptakan hubungan antar negara yang netral walaupun negara tersebut dekat dengan kita secara geografis karena setiap hubungan yang dilakukan antar negara terdapat kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh kedua negara sehingga mempengaruhi pola hubungan antar negara. Kepentingan-kepentingan tersebut yang kemudian dibawa dalam berhubungan dengan negara lain tinggal bagaimana kedua negara mengatur kepentingan-kepentingannya agar tidak saling berbenturan dan menimbulkan konflik antar negara.

Agar hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dapat berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa konflik yang tengah dihadapi, Indonesia harus dapat menyiasati hubungan tersebut sehingga konflik-konflik yang tengah dihadapi tidak berkembang luas dan diharapkan tidak terulang lagi. Ada beberapa hal yang “seharusnya” dapat dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga hubungannya dengan Malaysia tetap stabil dan terkendali. Dengan beberapa upaya yang dapat dikembangkan oleh Indonesia, baik di bidang militer maupun non-militer, maka Indonesia menjadi lebih siap untuk menjalin hubungan dengan negara lain dan menerima segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan tersebut.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN

- *Deterrence*

Indonesia perlu mengembangkan konsep deterrence atau penangkalan. Dengan adanya deterrence ini diharapkan dapat memberikan dampak psikologis terhadap negara-negara yang akan melakukan serangan militer ke Indonesia atau melakukan tindakan-tindakan lainnya sehingga mereka akan mengetahui efeknya jika mereka berani macam-macam terhadap wilayah Indonesia dan jika terjadi serangan balasan (*retaliation*). Salah satu langkah untuk mewujudkan deterrence tersebut yaitu dengan melakukan modernisasi atau pembangunan kekuatan militer Indonesia. Pembaharuan alutsista benar-benar dilakukan, tidak hanya sekedar perawatan persenjataan yang telah ada tetapi kita perlu membeli

senjata dan peralatan tempur lainnya yang modern juga memiliki teknologi yang canggih untuk melindungi wilayah NKRI ini. Kekuatan militer Indonesia terutama di bidang teknologi telah tertinggal jauh. Tetapi jika kita telah memiliki semua peralatan tersebut, kita jangan sampai lupa untuk menjaga atau merawatnya sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan semua peralatan tersebut dapat digunakan dengan lancar. Indonesia terkadang terlalu sering membangun tetapi lupa untuk menjaga atau merawatnya.

Modernisasi perlu dilakukan, terutama dalam Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) juga stabilisasi dalam Angkatan Darat (AD) untuk mempertahankan wilayah NKRI dari ancaman yang datang baik dari luar maupun dalam negeri. Modernisasi di AL harus dilakukan karena kemampuan militer armada laut kita sangat minim apalagi jika dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, kapal-kapal Indonesia rata-rata buatan akhir 1960-an dan tahun rekondisi 1980-an¹⁰. Dengan demikian apakah armada laut AL dapat melakukan tugas pengamanan yang menyeluruh? Walaupun secara kuantitas TNI AL memiliki 114 kapal yang terdiri dari berbagai tipe termasuk 2 buah kapal selam yang sedang kerepotan suku cadang¹¹. Malaysia sendiri memang tidak unggul dalam kuantitas armada lautnya, tetapi Malaysia memiliki kapal generasi modern seperti 2 buah Fregat generasi tahun 1990-an (Lekiu dan Jebat) yang dilengkapi sistem data tempur modern dalam hal pendeteksian kapal lawan¹².

Modernisasi TNI AU juga perlu dilakukan berkaitan dengan pesawat-pesawat yang dimiliki untuk melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Indonesia telah memiliki pesawat-pesawat tercanggih buatan Rusia, Su-30 dan Su-27. Selain Sukhoi Indonesia juga memiliki F-16 tetapi menghadapi persoalan suku cadang karena yang tersedia kini tinggal 8 buah dari sebelumnya 12 buah. Dalam hal kekuatan udara, Malaysia juga lebih unggul karena memiliki Su-30 sebanyak 18 buah, pesawat modern MiG-29 Fulcrum, termasuk F/A-18D Hornet generasi 1989-1990 buatan Amerika. Pesawat-pesawat tersebut kelasnya sudah di atas F-16 A/B yang dimiliki TNI AU yang berasal dari generasi tahun 1970-an¹³.

Dengan kenyataan tersebut, Indonesia harus memuali membangun kekuatan militernya untuk menjaga wilayah NKRI. Kawasan-kawasan perbatasan atau daerah-daerah yang dianggap rawan harus dijaga secara intensif seperti perairan Selat Malaka, Pulau Kalimantan, kawasan Natuna, dan daerah lain yang berbatasan atau berhubungan dengan negara Malaysia. Indonesia harus menempatkan armada dan personil-personil militernya yang kuat dan canggih, karena itulah perlu dilakukan modernisasi/pembangunan kekuatan militer agar Indonesia memiliki deterrence terhadap Malaysia.

10 Anak Agung Banyu Perwita dalam Jurnal Global 1/11/2004

11 *Ibid.*

12 Kodar S, *Menilik kekuatan RI-Malaysia*

13 *Ibid.*

Konsep detrence bukan berarti tanpa resiko dapat menimbulkan dampak lain bagi hubungan antar negara. Deterrence yang diikuti dengan modernisasi/pembangunan kekuatan militer dapat memunculkan kecurigaan dari negara lain atas pembangunan tersebut. Misalnya, untuk mendukung modernisasi militer maka Indonesia harus meningkatkan anggaran belanja pertahanannya dari rata-rata 1% PDB menjadi diatas 1% atau 3%-5% dari PDB agar dapat mengejar ketertinggalannya¹⁴. Hal ini dapat direspon oleh negara lain sebagai ancaman dan ikut membangun kekuatan militer negaranya sehingga mengakibatkan terjadinya perlombaan senjata (*Arms Race*) diantara negara-negara. Yang dapat dilakukan untk menghindari kecurigaan dan ketegangan, dalam pembangunan militernya Indonesia harus jelas kearah mana, misalnya bisa kearah *non-provocative defence*¹⁵. Pengembangan kapasitas pertahanan kita sebenarnya dapat dilandaskan pada prinsip ini sehingga tidak menstimulasi kekhawatiran negara lain dan perwujudannya jelas karena kejelasan tersebut sangat penting untuk meyakinkan masyarakat internasional.

- *Preventive Diplomacy*

Tidak semua persoalan antara Indonesia dengan Malaysia dapat diselesaikan dengan jalan militer untuk mencapai suatu penyelesaian. Kebanyakan untuk menyelesaikan masalahnya, Indonesia dengan Malaysia meakukan hubungan diplomasi untuk membicarakan dan melakukan lobi-lobi menyangkut permasalahan yang dihadapi kedua negara. Seperti yang dilakukan Indonesia untuk meminta pengertian dari Malaysia agar engundurkan masa amnesti bagi para TKI ilegal. Berbagai upaya diplomasi ditempuh untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua pihak tanpa melukai hubungan bilateral. Namun Indonesia perlu menggalakan upaya *preventive diplomacy* untuk mencegah segala bentuk permasalahan yang dihadapi dengan Malaysia berkembang mejadi konflik militer. Dalam pelaksanaannya, diplomasi yang dilakukan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dalam berdiplomasi dan mengerti akan masalah yang tengah dihadapi sehingga kepentingan-kepentingan kita dapat tersampaikan dalam berbagai perundingan menyangkut hubungan Indonesia dengan Malaysia. *Preventve diplomacy* perlu dilakukan Indonesia setidaknya untuk membangun komunikasi dan saling pengertian diantara kedua negara sehingga Indonesia diharapkan dapat mengantisipasi permasalahan yang ada agar tidak muncul ke permukaan dan mengakibatkan terjadinya konflik. Kemungkinan-kemungkinan konflik inilah yang harus dikelola melalui *preventive diplomacy*.

Selama ini upaya diplomasi Indonesia dipandang masih kurang dalam menangani masalah-masalah dengan Malaysia. Seperti yang terjadi pada kasus Sipadan-Ligitan atau permasalahan TKI ilegal. Pemerintah dianggap terlambat dalam merespon masalah-masalah tersebut. *Preventive*

14 Buku Putih Pertahanan RI 2003.

15 "Lingkungan strategis Indonesia", dalam www.csis.or.id, diakses pada bulan Juli 2006

diplomacy mencakup berbagai tindakan: *conflict avoidance*, *preventive action*, *conflict management*, *conflict resolution*, dan lain-lain. Semua istilah-istilah tersebut bertujuan sama yaitu mengelola konflik pada tahap paling awal dianggap lebih “manusiawi”, tidak mengeluarkan biaya banyak dan lebih *manageable* daripada saat konflik tersebut telah menginjak pada tahap yang lebih maju dan lebih luas. Diharapkan dengan melakukan *preventive diplomacy* Indonesia dapat menjaga hubungan baik dengan “menekan” konflik-konflik yang akan muncul.

- *Cooperative Security*

Kerja sama keamanan (*cooperative security*) memang perlu dilakukan oleh Indonesia, mengingat banyaknya masalah-masalah yang terjadi di kawasan-kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Setidaknya dengan dilakukannya kerja sama keamanan dapat meredam konflik yang terjadi. Seperti yang dilakukan di Selat Malaka, *cooperative security* dilakukan dengan patroli bersama di perairan tersebut dengan begitu Indonesia, Malaysia, Singapura tidak terlibat dalam peperangan namun penjagaan wilayah yang diklaim masing-masing negara. *Cooperative security* dapat meminimalisir terjadinya eskalasi konflik dan meningkatkan kerja sama antar negara di bidang pertahanan dan keamanan.

Masalah *piracy*, *illegal logging*, termasuk masalah TOC dan *transboundary issues* lainnya memang tantangan besar bagi kita, tapi merupakan bentuk konflik lain sehingga Indonesia tidak perlu mencurahkan dana terlalu besar. Indonesia lebih baik melakukan *cooperative security* dengan menjaga perairan beramai-ramai mengingat keterbatasan kapasitas pertahanan maritim Indonesia dengan demikian efisiensi juga dapat tercapai¹⁶. Indonesia dan Malaysia juga perlu mengadakan latihan militer gabungan berkaitan dengan banyaknya masalah keamanan yang muncul di sepanjang perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dimana latihan gabungan ini meliputi aspek darat, samudera, dan angkasa. Diharapkan dengan adanya latihan gabungan ini hubungan angkatan bersenjata kedua negara dapat kembali pulih. Di bidang non-militer, Indonesia-Malaysia pernah menjalin kerja sama dalam mengatasi kasus kabut asap di kawasan Sumatera yang menimbulkan berbagai masalah di wilayah kedua negara. Termasuk apakah nanti akan dibuat hujan buatan atau cara-cara lain disamping pengiriman tenaga untuk memadamkan kebakaran hutan.

Karena sifat kerja sama keamanan ini adalah lintas batas negara maka perlu dilakukan koordinasi peraturan atau hukum antara Indonesia dengan Malaysia. Hal ini perlu dilakukan agar dalam penanganan kasus-kasus seperti *piracy*, penyaluran TKI ilegal, atau ilegal logging agar jelas siapa yang berwenang atau bertugas dan bagaimana penanganan kasus-kasus tersebut sehingga tidak saling bertentangan satu sama lain. Dengan kata lain kedua negara harus memiliki sistem untuk bersama-sama

¹⁶ *Ibid.*

mengantisipasi dan mengatasi persoalan keamanan. Memang tidak semua masalah bilateral Indonesia-Malaysia dapat diselesaikan dengan *cooperative security* apalagi jika menyangkut masalah perbatasan atau klaim-klaim wilayah, tetapi *cooperative security* dapat dijadikan langkah awal di lapangan atau di lokasi terjadinya permasalahan (*dispute*) agar tidak terjadi konflik yang lebih luas sehingga negara dapat menentukan langkah selanjutnya untuk mengatasi persoalan atau sengketa tersebut.

Semua upaya-upaya diatas memang beberapa konsep yang dapat dilakukan dan bertujuan agar dapat dilaksanakan dalam tindakan riil. Dalam pelaksanaannya, konsep-konsep itulah yang dapat dijadikan patokan atau acuan untuk mengarahkan berbagai usaha dan upaya agar membentuk Indonesia yang lebih kuat dan maju. Indonesia dapat menjadi kuat untuk menjaga wilayahnya (dengan segala potensinya) dan kepentingannya baik dari segi pertahanan kewanaman maupun dari segi diplomasi.

Upaya-upaya yang telah disebutkan diatas merupakan sebagian kecil dari berbagai upaya yang dapat ditempuh oleh Indonesia dalam rangka menjaga hubungan baik dengan Malaysia. Jangan sampai kerja sama yang telah terjalin dengan Malaysia selama ini (baik bilateral maupun dalam lingkup ASEAN) menjadi goyah. Tidak dapat dipungkir lagi bahwa Indonesia dengan Malaysia saling membutuhkan satu sama lain untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masing-masing negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi Indonesia dengan Malaysia untuk bekerjasama di bidang energi dengan memanfaatkan blok Ambalat. Hal ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan Malaysia walau sempat terjadi konflik diantara kedua negara. Semua upaya-upaya tersebut selayaknya dijalankan secara seimbang tidak hanya dititikberatkan pada salah satu aspek saja sehingga dapat saling mendukung. Jika hanya dititikberatkan pada salah satu upaya saja dikhawatirkan dapat berjalan timpang atau tidak sesuai dengan harapan.

PENUTUP

Dalam hubungan bernegara memang tidak selamanya berjalan harmonis pasti terdapat beberapa potensi persoalan yang dapat menggoyahkan hubungan antar negara. Setiap persoalan yang terjadi dapat menimbulkan dua dampak yang berbeda bagi negara, dampak tersebut dapat berupa kerja sama atau konflik. Indonesia dan Malaysia telah mengalami berbagai persoalan yang mengganggu kerja sama yang selama ini telah dibangun. Dari permasalahan perbatasan yang hampir mengarah pada konflik militer. Persoalan TKI ilegal, *piracy*, *transboundary issues* juga sempat mengganggu hubungan kedua negara. Terkadang dalam suatu konflik, satu aspek yang terkena konflik dapat merambat ke aspek-aspek lainnya. Dari sudut pandang Indonesia, agar tidak terulang lagi atau setidaknya mengantisipasi konflik-konflik yang dapat terjadi, Indonesia harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik dan meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) Indonesia terhadap Malaysia. Segala upaya yang dilakukan bertujuan agar kelak tidak ada lagi permasalahan yang mengganggu hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Malaysia.

Pada dasarnya hubungan antar negara dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara dan hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik jika kepentingan-kepentingan tersebut tidak saling berbenturan. Hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia sebenarnya dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, hanya tinggal bagaimana kedua negara saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mengantisipasi dan mengelola potensi konflik, dan akhirnya mengembangkan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan di berbagai bidang (poleksosbud hankam).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

David Glover, Timothy Jessup, *Mahalnya Harga Sebuah Bencana*, ITB Bandung, 2002.

Makalah

Mata Kuliah Isu-isu Global, *Kasus Ilgeal Logging di Indonesia*, UPN “Veteran”, Yogyakarta, 2006.

Mata Kuliah Studi Kebijakan Pertahanan, *Kebijakan Pertahanan Indonesia*, UPN “Veteran”, Yogyakarta, 2006.

Makalah PNMHI, *Dampak Kebakaran Hutan Indonesia Terhadap Negara Tetangga di Kawasan Asia Tenggara*, Yogyakarta, 2004.

Website

“Lingkungan strategis Indonesia”, dalam www.csis.or.id, diakses pada bulan Juli 2006.

“Indonesia-Malaysia amankan perbatasan”, dalam www.tempointeraktif.com, diakses pada bulan Juli 2006.

“Indonesia-Malaysia bekerjasama membuat satelit”, dalam www.ristek.go.id, diakses pada bulan Juli 2006.